

KEMAJEMUKAN ETNIK DI INDONESIA (SEBUAH RESIKO ATAU POTENSI ?)

oleh

Sunarso

Abstrak

Sejak tahun 1970-an masalah etnik, kembali tampil keatas pentas politik di berbagai negara. Tampilnya masalah tersebut disebabkan oleh berbagai kekecewaan berlarut dalam nation state (negara bangsa) yaitu negara dengan bermacam-macam etnik. Bahkan futurolog Alvin Toffler meramalkan bahwa masalah etnik ini akan berlanjut terus sampai abad ke 21.

Indonesia termasuk negara yang memiliki begitu banyak etnik. Dalam usianya yang telah mencapai setengah abad lebih, Indonesia pernah menghadapi berbagai macam pemberontakan yang sebagian jelas bermotifkan ketidakpuasan etnik. Padahal dengan alasan apapun pemberontakan etnik yang meluas jelas merupakan faktor disintegratif yang berbahaya terhadap keutuhan bangsa.

Kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap masalah etnik adalah, di satu sisi pemerintah tetap mewaspadaai kemungkinan timbulnya gejolak etnik yang bersifat disintegratif. Tetapi pada sisi yang lain pemerintah juga menganut kebijaksanaan yang sangat akomodatif terhadap eksistensi etnik. Oleh karena itu kemampuan preventif dan represif yang memadai untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi kemungkinan pemberontakan etnik tetap perlu dipelihara, seiring dengan upaya meneruskan kebijakan memenuhi aspirasi dan kepentingan dari seluruh etnik yang ada. Disamping itu diperlukan juga kajian mendalam mengenai etnik bagi negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi seperti Indonesia. Sebab pengabaian terhadap masalah ini akan menimbulkan gejolak politik, padahal bila dicermati dan diantisipasi dengan baik hal tersebut bisa dihindari. Bahkan kemajemukan etnik di Indonesia justru merupakan potensi bukan suatu resiko atau kerawanan.

Pendahuluan

Masalah etnik, yang dalam kehidupan politik lazimnya berada di latar belakang dan dipandang sekedar sebagai masalah masa lampau, sejak tahun 1970-an kembali tampil keatas pentas politik. Tampilnya masalah tersebut di berbagai negara disebabkan oleh berbagai kekecewaan berlarut dalam nation state (negara bangsa) yaitu negara dengan bermacam-macam etnik. Akibat dari kekecewaan tersebut muncul gerakan-gerakan etnik yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik,

minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, maksimal untuk mendirikan negara etnik tersendiri (Koentjaraningrat, 1993:2). Bahkan futurolog Alvin Toffler meramalkan bahwa masalah etnik ini akan berlanjut terus sampai abad ke 21 (Toffler, 1990:249). Jika terbentuknya negara bangsa dalam sejarah politik modern sejak abad 18 ditandai dengan bergabungnya banyak etnik kedalam satu negara, maka kebangkitan etnik yang tengah marak dewasa ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu indikasi dari kegagalan negara bangsa. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan menjadikan banyak negara bangsa mengalami disintegrasi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini juga termasuk negara yang memiliki begitu banyak etnik. Dengan demikian maka tidak terkecuali juga menghadapi fenomena global seperti tersebut di atas. Dalam usianya yang telah mencapai setengah abad, Indonesia pernah menghadapi berbagai macam pemberontakan, yang sebagian jelas bermotifkan ketidakpuasan etnik, terutama dari etnik yang berdiam di luar pulau Jawa. Antara tahun 1948-1962 Indonesia bahkan tercatat sebagai negara yang paling tidak stabil di dunia (Feierabend dalam Davies, 1971:229). Padahal dengan alasan apapun pemberontakan etnik yang meluas jelas merupakan faktor disintegratif yang berbahaya bagi keutuhan Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk mengantisipasi diperlukan kajian etnik secara lebih mendalam, lebih-lebih bagi bangsa dengan multi etnik seperti Indonesia. Pengalaman mengajarkan bahwa pengabaian masalah etnik ini dapat menyebabkan terjadinya gejolak politik yang dampaknya sangat merugikan bangsa.

Permasalahannya adalah, disukai atau tidak etnik bukan saja ada dalam setiap negara bangsa, tetapi juga hampir semua negara di dunia mempunyai penduduk yang multi etnik. Terbukti dari 175 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 12 negara saja yang penduduknya agak homogen (Koentjaraningrat, 1993: 3). Bagi Indonesia kemajemukan etnik adalah realita yang tidak mungkin diingkari. Untuk selanjutnya yang harus diusahakan adalah bagaimana agar kemajemukan itu menjadi potensi yang menguntungkan bagi kehidupan bangsa, bukan sebaliknya menimbulkan konflik yang merusak. Oleh karena itu harus ada usaha dari berbagai pihak khususnya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan agar kemajemukan itu menjadi potensi bukan kerawanan.

Pengertian Etnik

Jika dilihat dari karakteristik biologisnya, umat manusia lazim dikelompokkan dalam berbagai ras. Selanjutnya bila ras tersebut dikaitkan dengan kebudayaannya, maka terbentuklah etnik. Dengan demikian suatu ras yang sama dapat timbul berbagai macam etnik. Dengan mengutip Naroll, Frederic Barth merumuskan etnik sebagai berikut:

"Etnik adalah suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan sendiri ciri kelompoknya, yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain" (Barth, 1988:l).

Studi tentang etnik, yaitu studi mengenai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang sama, mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kebanyakan kajian yang dilakukan terhadap etnik dilakukan dari aspek biologis dan aspek budaya. Kajian etnik dari aspek biologis menghasilkan ilmu antropologi fisik, sedangkan kajian etnik dari aspek budaya menghasilkan ilmu antropologi budaya. Hal yang masih jarang dilakukan dan belum begitu populer adalah kajian etnik dari aspek politik. Para ilmuwan politik kurang tertarik untuk mengkaji masalah etnik ini dari aspek ini dari aspek politik, karena sering menganggap masalah etnik adalah masa lampau. Studi aspek politik dari etnik inilah yang disebut etnisitas. Perhatian para ilmuwan politik saat ini lebih banyak diberikan kepada intuisi yang lebih modern seperti partai politik, pemilihan umum, pemerintahan, hak asasi warga negara, konflik politik dan sebagainya. Pada hal implikasi dari adanya bermacam-macam etnik dalam satu negara nasional ternyata tidak dapat diabaikan begitu saja.

Baik sewaktu etnik diakui secara resmi maupun pada saat ini dianggap tidak ada, jaringan kerja sama etnik ini terpelihara dan berfungsi secara formal (Saafroedin Bahar, 1994). Jaringan kerjasama etnik itu akan timbul ke permukaan jika otoritas negara menjadi lemah, yang mengharuskan warga etnik itu berjuang sendiri mempertahankan aspirasi serta kepentingannya. Padahal jika sampai terjadi rivalitas serta bentrokan etnik dalam suatu negara, akibat yang ditimbulkannya bisa sangat mengerikan. Oleh karena itu ilmuwan politik tidak dapat lagi mengabaikan masalah etnisitas ini, apalagi di negara yang warganegarannya secara etnik sangat majemuk seperti Indonesia.

Kaitan Etnik, Nasionalisme dan Negara Bangsa

Negara nasional yang memiliki banyak etnik tersebut hanya dapat dibentuk dan berfungsi baik berdasar faham nasionalisme. Sebab faham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang mejemuk, jika warga masyarakat tersebut benar-benar bertekad kuat untuk membangun masa depan bersama, terlepas dari perbedaan agama, ras, etnik atau ikatan primordial lainnya. Nasionalisme adalah suatu visi, suatu persepsi dan bangsa yang dibangun berdasar visi ini adalah suatu "imagined community" (Anderson, 1989).

Model ideal dari negara yang homogen dari segi etnik sulit ditemukan, akibatnya hampir semua negara harus menampung realitas kemajemukan etnik di dalamnya. Sehingga tidak sedikit negara yang menghadapi gerakan separatis, yaitu calon negara-negara berdaulat di wilayahnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa setiap etnik ingin atau berhasil mendirikan suatu negara berdaulat. Tidak semua perbedaan etnik (ras, bahasa, agama) dipolitikkan dan tidak semua yang dipolitikkan memilih kedaulatan sebagai tujuan mereka. Menurut Gellner jumlah nasionalisme potensial di dunia ini didasarkan bahasa atau perbedaan kultural lainnya ada lebih kurang 8000 macam, dan kenyataannya jumlah negara saat ini baru sekitar 185 buah, sedangkan jumlah nasionalisme yang menurut dia efektif ada sekitar 800 (Ernes Gellner dalam Lance Castles, 1994: 2). Lebih jauh Gellner mengemukakan, bahwa di jaman nasionalisme dewasa ini, lebih dari 90% nasionalisme-nasionalisme teoritis tidak akan mencapai apa yang biasanya dianggap tujuan dari setiap gerakan nasional yaitu suatu negara bangsa yang berdaulat. Senada dengan pendapat di atas menurut Lance Castles popularitas nasionalisme di jaman modern ini lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan masyarakat industri yang maju untuk memiliki penduduk yang berkualitas, serta bermobilitas tinggi guna mencapai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif (Lance Castles, 1994: 3). Negara bangsa dengan sistem pendidikannya yang disentralisir untuk mencapai keseragaman budaya atas dasar pemakaian satu bahasa nasional bisa melayani kebutuhan ini. Kebutuhan akan homogenitas menciptakan nasionalisme dan bukan sebaliknya. Kelompok-kelompok etnik kecil atau tersebar biasanya akan menerima bahwa mereka tidak bisa mencapai tujuan negara industri berdaulat itu dengan kekuatannya sendiri.

Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia Mengenai Etnik

Kebijaksanaan paling dasar dari pemerintah Indonesia mengenai etnik ini terdapat dalam Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 15 Agustus 1974 di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

"Ya, kita memang berbeda-beda tetapi kita bertekad untuk bersatu. *Bhinneka Tunggal Ika* !. Apabila kita ingin bersatu, maka persoalan pokoknya bukan menghilangkan perbedaan-perbedaan tadi. Itu adalah mustahil, karena bertentangan dengan kodrat. Biarlah perbedaan itu ada dan tetap ada. Yang kita usahakan adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu dapat tetap mempersatukan kita dalam persatuan yang indah, seperti indahnya kesatuan warna-warni yang serasi ...

Bagaimana usaha kita memperkokoh *kebhinneka tunggal ikaan* itulah sesungguhnya garis pembinaan kehidupan sosial politik yang kita arah" (Krissantono, 1976: 53).

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan dasar tersebut, telah dirancang beberapa kebijaksanaan lanjutan yang secara langsung maupun tidak ditujukan untuk kepentingan etnik. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, kebijaksanaan pemerataan pembangunan melalui proyek-proyek Inpres yang dibiayai APBN, dan perlakuan khusus bagi golongan ekonomi lemah. Proyek Inpres adalah nama populer proyek-proyek APBN tertentu dengan pendekatan kewilayahan, seperti Proyek Bantuan Desa, Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Proyek Bantuan Pembangunan Desa Tertinggal. Baik kita sadari atau tidak, dalam hubungannya dengan pasal 18 dan 32 UUD 1945, proyek-proyek tersebut memiliki dimensi dan relevansi etnik. Perhatian khusus pemerintah pusat kepada daerah-daerah ini sekaligus menjadi landasan legitimasi yang kuat bagi wibawa pemerintah pusat di daerah.

Kebijakan lainnya yang berdimensi etnik adalah pemberian perlakuan khusus terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah (golongan pribumi) tanpa melalui tender umum. Dalam rangka membangun ketahanan nasional Indonesia yang tangguh, secara pribadi presiden Soeharto cukup aktif dalam menghargai eksistensi, aspirasi dan kepentingan etnik. Dalam berbagai amanatnya beliau selalu menekankan makna kemajemukan masyarakat Indonesia bagi kehidupan kenegaraan secara menyeluruh. Sebagai contoh, membangun Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, mendorong tumbuhnya gerakan sosial ekonomi etnik Minangkabau yang populer dengan gerakan Seribu Minang, membuka kongres bahasa Jawa di Semarang. Dalam menghadapi kegelisahan etnik Timor Timur,

beliau membentuk Komisi Penyelidik Nasional dan memerintahkan bersidangnya Dewan Kehormatan Militer. Selain itu juga bersedia berdialog dengan tokoh-tokoh Timor Timur yang anti integrasi dengan Republik Indonesia (kompas, 7 Nopember 1994).

Masalah etnik di Indonesia yang tetap masih belum memperoleh penyelesaian secara memuaskan adalah kecemburuan berlarut dari etnik pribumi terhadap keberhasilan etnik China dalam bidang ekonomi. Kecemburuan tersebut bersifat laten dan dapat menjadi manifes dalam waktu yang amat cepat (Saafroedin Bahar, 1994). Akar masalahnya adalah kesan keberhasilan luar biasa dari usahawan besar etnik China dalam memanfaatkan demikian banyak peluang ekonomi yang terbuka dalam pembangunan nasional. Kecemburuan ekonomi tersebut nampaknya akan tetap berlanjut selama ada perjuangan yang tidak seimbang dalam perebutan alokasi sumber daya nasional.

Berbagai kasus kriminalitas ekonomi yang melibatkan usahawan etnik China yang berkolosi dengan beberapa oknum pejabat pemerintah telah menambah kecemburuan antara etnik yang oleh Nasikun disebut sebagai "ethnic politics". Gejala ini sangat berbahaya bagi Indonesia yang multi etnik. Selanjutnya Nasikun memperingatkan bahwa masalah potensial yang dapat timbul dalam sepuluh tahun mendatang adalah ancaman perpecahan nasional yang berawal dari krisis ekonomi, rasialisme, dan pertentangan agama. Untuk mengatasi masalah itu maka diperlukan adanya demokratisasi kehidupan politik dan ekonomi secara lebih bersungguh-sungguh (Media Karya, No. 125, September 1994: 13).

Wawasan Nasional Untuk Mengatasi Kemajemukan Etnik

Jika keanekaragaman etnik dalam suatu negara bangsa adalah suatu kenyataan yang tidak mungkin dihindari, maka pertanyaan mendasar yang memerlukan jawaban adalah bagaimana agar seluruh etnik tersebut dapat hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Saafroedin Bahar (1994:94) mengemukakan bahwa upaya membangun suatu wawasan nasional bersama adalah suatu langkah pertama yang amat penting. Dalam wawasan nasional tersebut setiap etnik dapat melihat eksistensi, aspirasi dan kepentingannya bukan saja diakui, tapi juga dilindungi dan didukung secara teris menerus. Dalam sebuah negara bangsa yang bersifat multi etnik, yang didasarkan pada wawasan nasional yang bersifat inklusif tersebut, masing-masing etnik tetap akan merasa memperoleh tempat.

Beruntunglah Indonesia yang telah memiliki Wawasan Nusantara

sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Sebagai pedoman bagi pembinaan nasional, Wawasan Nusantara masuk dalam GBHN, dengan isi pokok sebagai berikut:

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik dalam arti: (1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. (2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. (3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. (4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. (5) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya dalam arti: (1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan perikehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. (2) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti: (1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. (2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki

oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti: (1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau, satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. (2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa (Kewiraan, Lemhanas, 1992: 7). Masuknya Wawasan Nusantara dalam GBHN sejak tahun 1973 itu berarti Wawasan Nusantara telah menjadi Wawasan Ketatanegaraan, hal ini berarti mengikat seluruh warga negara maupun para penyelenggara negara. Apabila seluruh warga negara dan penyelenggara negara dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan wawasan nasionalnya, maka kemajemukan etnik di Indonesia justru akan menjadi potensi bukan suatu resiko atau kerawanan.

Penutup

Walaupun dalam masa kebangkitan nasional masalah etnik dipandang tidak sejalan dengan paham nasionalisme Indonesia, namun baik pada saat mendirikan, mempertahankan dan membangun negara, etnik di Indonesia memperoleh pengakuan baik secara eksplisit dalam pasal 18 dan 32 UUD 1945 maupun dalam berbagai kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini merupakan faktor penentu, agar berbagai etnik yang ada di Indonesia tidak perlu lagi untuk berjuang guna memperoleh pengakuan terhadap identitas, aspirasi serta kepentingan yang syah. Sebab pengalaman telah mengajarkan bahwa pengabaian aspirasi dan kepentingan dari etnik dapat merupakan salah satu faktor penyebab pembontakan.

Loyalitas etnik terhadap negara ternyata tidak lagi bisa dipandang sebagai hal yang timbul dengan sendirinya. Akan tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan loyalitas pemerintah (negara) terhadap aspirasi dan kepentingan etnik. Sebagaimana loyalitas warga negara, loyalitas etnik bukan saja harus dibangun, tetapi juga harus dipelihara, serta dikembangkan oleh negara.

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masalah etnik adalah, di satu sisi pemerintah tetap mewaspadaikan kemungkinan timbulnya gejolak etnik yang bersifat disintegratif dan mengancam ketahanan nasional. Tetapi pada sisi yang lain pemerintah juga menganut kebijaksanaan yang sangat akomodatif terhadap eksistensi etnik, dan memberinya peran yang konstruktif dalam pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik nasional. Oleh karena itu kemampuan

preventif dan represif yang memandai untuk mencegah, menangkal dan menggulangi kemungkinan pembontakan etnik tetap perlu dipelihara, seiring dengan upaya meneruskan kebijakan memenuhi aspirasi dan kepentingan dari seluruh etnik yang ada.

Kajian mendalam mengenai etnik sangatlah perlu bagi suatu negara dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Lebih-lebih bagi negara yang multi etnik dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi seperti di Indonesia. Sebab pengabaian terhadap masalah ini akan menimbulkan gejolak politik, pada hal bila dicermati dan diantisipasi dengan baik hal tersebut dapat dihindari.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 1989. *Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, verso, London.
- Bahar, Saafroedin. 1994. *Masalah Etnisitas dan Ketahanan Nasional: Resiko atau Potensi*, Makalah Seminar Nasional Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Barth, Fredric. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Castles, Lance. 1994. *Etnisitas dan Keutuhan Wilayah Negara-negara : Pandangan Global*, Makalah Seminar Nasional Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Davies, James Chowning. 1971. *When Men Revolt and Why, A Reader in Political violence and Revolution*, The Free Press, New York.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, UI Press, Jakarta.
- Krissantono. 1976. *Pandangan Presiden Suharto tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta.
- Kompas, 7 Nopember 1994.
- Lemhanas. 1992. *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, PT Gramedia, Jakarta.
- Media Karya, No. 125, September 1994.

Toffler, Alvin. 1990. *Powershift, knowledge, Wealth, and violence at the Edge of the 21th Century*, Bantam Books, New York.